

GLOBALISASI EKONOMI VIETNAM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BELT AND ROAD INITIATIVE

Nafisah Rizqillah Maharani¹, Najamuddin Khairur Rijal²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: nafisah.isab77@gmail.com

Abstract: This study aims to see how globalization has an impact on the Vietnamese economy, especially with regard to the construction of the Belt and Road Initiative (BRI) project. This study uses a hyperglobalist approach that focuses on the economic dimension of globalization and uses a descriptive method with library research techniques. where this country is known to have a wealth of natural resources that have not been managed optimally. In addition, the flow of Foreign Direct Investment (FDI) that enters through the Belt and Road Initiative (BRI) is projected to be able to create more jobs and encourage infrastructure development and domestic economic progress. Furthermore, cooperation in the Belt and Road Initiative (BRI), allows Vietnam to feel the positive impact of China's economic growth, both from the sharing of technology, ideas, and investment flows from Beijing.

Keywords: Vietnam; Globalization; Belt and Road Initiative; China; Development

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana globalisasi berdampak pada perekonomian Vietnam, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan proyek Belt and Road Initiative (BRI). Penelitian ini, menggunakan pendekatan hyperglobalist yang difokuskan pada dimensi ekonomi globalisasi dan menggunakan metode deskriptif dengan teknik penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya ditemukan bahwa pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) memberi keuntungan bagi Vietnam, yaitu untuk mengoptimalkan industri pengelolaan sumber daya alamnya yang mana negara ini diketahui memiliki kekayaan SDA yang belum dikelola secara optimal. Selain itu, aliran Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk melalui Belt and Road Initiative (BRI) diproyeksikan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan mendorong pembangunan infrastruktur serta kemajuan ekonomi domestik. Lebih jauh, kerja sama dalam Belt and Road Initiative (BRI), membuat Vietnam dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, baik dari adanya sharing teknologi, ide, maupun aliran investasi dari Beijing.

Kata kunci: Vietnam; Globalisasi; Belt and Road Initiative; China; Pembangunan

PENDAHULUAN

Perubahan dan globalisasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Di satu sisi, perubahan dan perkembangan dalam bidang teknologi menjadi instrumen yang mendorong globalisasi. Perkembangan teknologi komunikasi membuat manusia yang hidup di belahan dunia berbeda dapat dengan mudah berinteraksi atau bahkan bertransaksi. Adapun penemuan dalam bidang transportasi mempermudah mobilisasi manusia maupun barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sekalipun jaraknya yang sangat jauh. Di sisi lain, globalisasi mendorong kemajuan dalam berbagai bidang dengan mempertemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sebuah perusahaan dapat membuat mobil pintar (*smart car*) dengan memanfaatkan kemampuan insinyur dari Jerman yang andal dalam urusan membuat mobil, dan kejelian insinyur Amerika Serikat yang dapat membuat algoritma untuk menciptakan mobil yang dapat berpikir dan membuat keputusan sendiri. Hal semacam inilah yang kemudian membuat kemajuan semakin mudah digapai, yaitu ketika orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi untuk menciptakan penemuan baru yang berguna bagi kehidupan manusia.

Selama ini, perdebatan mengenai dampak negatif dan dampak positif telah menjadi ruang diskusi yang mengiringi kemajuan globalisasi. Beberapa orang berpandangan bahwa globalisasi hanya memberi dampak negatif, dengan menggerus nilai-nilai kemanusiaan, dan menciptakan jurang pemisah antara masyarakat proletariat dan golongan elit. Demikian pula dalam kaitannya dengan konteks negara, globalisasi dianggap sebagai instrumen bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga, menciptakan sistem yang menguntungkan bagi mereka, dan berupaya mempertahankan eksistensi sistem semacam ini. Argumen semacam ini biasanya didasarkan pada apa yang terjadi di kawasan-kawasan kurang berkembang. Misalnya saja di Benua Afrika, di mana globalisasi dianggap berpotensi merugikan ekonomi domestik jika terekspos oleh pasar internasional. Sistem perekonomian negara yang belum siap menerima paparan ekonomi global, yang membawa persaingan lebih luas dapat menyebabkan sebuah negara kalah bersaing dan semakin tertinggal (Muthoka, 2015). Namun, hal semacam ini hanyalah masalah kesiapan. Di balik resiko besar yang dibawa globalisasi, terdapat peluang bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan globalisasi bagi kepentingan negaranya.

Salah satu contoh terbaik di mana negara berkembang mampu memanfaatkan potensi globalisasi adalah apa yang telah, dan sedang dilakukan oleh Vietnam. Pada periode tahun 1980-an, Vietnam dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sistem ekonomi yang diterapkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Inflasi yang terjadi bahkan mencapai angka 400 persen, dan pemadaman listrik merupakan hal yang biasa terjadi di kota-kota Vietnam (Fund, 2018). Namun, strategi pemerintah dalam mentransformasi kebijakan ekonomi telah memberi keuntungan bagi perkembangan ekonomi Vietnam. Saat ini Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.7 persen pada tahun 2021, dan diproyeksikan meningkat sebesar 7 persen pada tahun 2022 (Tung, 2021). Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mulai membuka diri bagi potensi kerja sama dari pihak-pihak eksternal, sehingga berbagai sektor dalam negeri dapat dikembangkan dengan memanfaatkan aliran dana maupun transfer ide yang menguntungkan.

Kawasan Asia Tenggara memang terdiri dari negara-negara berkembang yang sebagian besar di antaranya berada dalam fase pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit, dan transportasi, merupakan “*goals*” yang terus diupayakan untuk menopang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah sering kali berupaya mempermudah aliran investasi asing, yang diharapkan mampu membiayai pembangunan proyek-proyek pemerintah. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka tidak mengherankan jika proses globalisasi ekonomi menjadi salah satu indikator yang mendorong peningkatan *Gross Domestic Product* di negara-negara ASEAN

(Suliswanto, 2016). Potensi besar yang dimiliki kawasan Asia Tenggara seperti sumber daya alam yang melimpah dan upah buruh yang cenderung rendah, menjadikan ASEAN *production base* yang menarik bagi investor asing. Hal ini terbukti dari jumlah *Foreign Direct Investment* (FDI) yang semakin meningkat tiap tahunnya (Kaluge, 2011).

Kondisi negara-negara Asia Tenggara yang membutuhkan investasi, semakin terakomodasi dengan adanya pembangunan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diinisiasi oleh Tiongkok. Proyek yang awalnya dikenal sebagai *One Belt One Road* (OBOR) ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. BRI merupakan mega proyek berbasis pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara yang kurang berkembang. Proyek ini terdiri dari dua kerangka yaitu; *Pertama, Silk Road Economic Belt* yang merupakan jalur berbasis darat yang menghubungkan antara Tiongkok dengan Eropa, melintasi pedalaman Asia Tengah. Kedua, *21st Century Maritime Silk Road* yang menghubungkan antara Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara melalui pembangunan pelabuhan dan rel kereta api (Cai, 2017).

BRI merupakan proyek yang mendorong keterbukaan dan interkoneksi antar wilayah. Selain itu, proyek ini juga merupakan proyek berbasis investasi yang memberi keuntungan bagi pihak-pihak terlibat. Maka tidak mengherankan, jika dikatakan bahwa BRI memiliki “dimensi globalisasi” yang sangat kuat. Potensi yang ditawarkan oleh proyek ini, memberi kesempatan bagi negara-negara yang dilintasi untuk memaksimalkan potensi bagi keuntungan mereka. Sebagai salah satu negara yang masuk dalam koridor pembangunan BRI, tentu Vietnam merasakan dampak dari adanya pembangunan proyek ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana globalisasi berdampak terhadap perekonomian Vietnam, dalam kerangka pembangunan BRI.

KAJIAN PUSTAKA

Hyperglobalist – Optimist View of Globalization

Fenomena globalisasi telah menimbulkan perdebatan di antara para akademisi maupun analis mengenai apa itu globalisasi, bagaimana globalisasi terjadi, kapan globalisasi dimulai, dan apa dampak yang akan ditimbulkan oleh globalisasi? Perdebatan ini kemudian memunculkan pendekatan-pendekatan berbeda untuk memahami konseptualisasi globalisasi itu sendiri. Beberapa pendekatan globalisasi yang paling sering digunakan untuk memahami globalisasi adalah *sceptics traditionalist*, *hyperglobalist*, dan *transformationalist*. *Sceptics traditionalist* kelompok yang mengadopsi pandangan bahwa globalisasi adalah merupakan fenomena lanjutan dari internasionalisasi. Selain itu, globalisasi merupakan fenomena yang dapat dikelola dan memberikan berbagai dampak negatif di berbagai sektor kehidupan manusia. Kemudian adalah pandangan *hyperglobalist*, yaitu kelompok yang mengadopsi pemikiran bahwa globalisasi adalah fenomena baru yang tidak bisa kita hindari. Selain itu, mereka memahami bahwa globalisasi adalah fenomena yang memberi banyak keuntungan dan dampak positif. Yang terakhir adalah *transformationalist*, yaitu mereka setuju bahwa globalisasi telah memberi dampak positif terhadap peningkatan interkoneksi global dan penyebaran nilai. Namun di sisi lain, globalisasi juga telah menyebabkan ketimpangan masyarakat global, terkhusus antara masyarakat negara maju dan negara berkembang.

Penelitian ini, akan menggunakan perspektif *hyperglobalist* untuk memahami bagaimana globalisasi telah memberi keuntungan bagi Vietnam, khususnya dalam sektor perekonomian. Kelompok ini berpendapat bahwa dunia telah memasuki era *‘truly global age’* yang didominasi oleh kapitalisme global. Logika pemikiran yang digunakan oleh kelompok *hyperglobalist* menganut nilai-nilai neo-liberalis yang melihat globalisasi dari sudut pandang keterbukaan pasar. Perubahan prinsip dalam ekonomi global berpengaruh terhadap perubahan dalam sektor politik, sosial, budaya, dan hubungan antara individu dan negara (Parjanadze, 2009).

Globalisasi didorong oleh *‘driving force’* yang mengubah struktur hierarkis yang telah ada sebelumnya. Peran negara bangsa semakin berkurang, yang diikuti dengan meningkatnya perusahaan

multinasional. Kondisi ini menciptakan pasar global di mana negara-negara dunia terintegrasi dalam satu pasar bebas (Stefanović, 2008). Pihak-pihak yang memanfaatkan globalisasi dengan mengikuti aktivitas dalam pasar bebas kemudian dapat mendapat keuntungan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi, pembangunan, dan kemakmuran sebuah negara. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pandangan ini menjadikan sektor ekonomi dan keterbukaan sebagai salah satu nilai utamanya.

Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Globalisasi merupakan fenomena multi-sektor yang dapat dianalisis menggunakan berbagai macam perspektif. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai macam definisi mengenai apa sebenarnya pengertian dan makna dari globalisasi itu sendiri. Albrow melihat globalisasi sebagai proses yang membuat masyarakat dunia menyatu menjadi satu ke dalam bentuk *global society*. Lebih jauh, Appadurai berargumen bahwa penyatuan masyarakat global dibentuk oleh percampuran budaya atau hibridisasi antar lokasi dan identitas. Sementara itu, Barber menggunakan pendekatan yang lebih skeptikal, dengan argumen bahwa globalisasi merupakan kemunculan tatanan global di mana *McWorld* yang konsumtif menyatu dengan politik identitas 'Jihad' dalam sebuah konflik besar. Dari beberapa definisi globalisasi oleh para ahli, definisi yang diberikan oleh Angell adalah salah satu yang paling dapat menggambarkan globalisasi saat ini. Menurut Angell, globalisasi merupakan kondisi di mana dunia sudah sangat interdependen, sehingga independensi nasional merupakan sesuatu yang bersifat anakronistik (tidak kompatibel dengan zaman). Interdependensi yang terjadi dibentuk oleh kebaruan dalam sains, teknologi, ekonomi, dan ketergantungan antar negara yang terbentuk telah menjadikan perang antar negara modern sebagai sesuatu yang mustahil (Beerrens, 2006).

Akan tetapi, pendapat Angell bahwa interdependensi membuat perang sebagai sesuatu yang mustahil nampaknya terlalu naif. Interdependensi memang akan membuat negara berpikir lebih jauh untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Hal ini karena adanya interkoneksi yang kompleks dapat berujung pada permasalahan di sektor-sektor lain. Interdependensi khususnya dalam bidang ekonomi, akan membuat negara cenderung lebih memilih bekerja sama daripada berkonflik. Di masa lalu, invasi dan ekspansi merupakan upaya negara dalam mencapai kepentingan nasional dan mengeruk keuntungan dari negara lain. Namun di era globalisasi, negara dapat meraup keuntungan yang bahkan berkali-kali lipat dengan mengadakan kerja sama ekonomi. Perang hanya akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terlibat, sedangkan ekonomi bersifat simbiosis mutualisme yang menguntungkan bagi negara.

Perubahan dinamika hubungan internasional yang terjadi sejak tahun 1980-an telah mentransformasi bentuk dan fungsi negara. Fungsi operasional negara yang berkaitan dengan campur tangan langsung dalam kegiatan pasar semakin berkurang. Negara dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem yang berorientasi ekonomi global dan strategis. Selain daripada menjalankan tugas tradisional seperti menjamin keamanan, melaksanakan legislasi, dan mengupayakan stabilitas, negara modern harus berupaya mengembangkan ekonomi nasional agar dapat bersaing dalam cakupan internasional (Ali & Kaynak, 2021). Ekonomi telah menjadi salah satu indikator yang paling berpengaruh dalam dinamika internasional. Maka, tidak mengherankan jika konstelasi internasional dipenuhi dengan negara-negara yang menjadikan ekonomi sebagai kepentingan nasionalnya, menggunakan ekonomi sebagai alat diplomasi, maupun untuk menekan negara lain agar berperilaku sesuai dengan norma internasional.

Globalisasi membawa keterbukaan dan menciptakan interkoneksi secara mengglobal. Kondisi ini menjadi peluang bagi negara-negara untuk memaksimalkan potensi kerja sama dalam upaya mencapai kemakmuran. Terdapat banyak sisi positif globalisasi bagi sektor ekonomi. Misalnya, persaingan terbuka dan mendorong negara untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga menciptakan produk yang lebih baik. Secara instan, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan

transfer teknologi dari negara maju tanpa harus mengeluarkan biaya untuk program pengembangan. Selain itu, aliran keuangan global memberi kesempatan bagi negara tertinggal untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya (Levy, 2013).

Kesimpulannya adalah, bahwa globalisasi menciptakan peluang bagi semua entitas untuk mengembangkan dirinya. Baik negara, institusi, kelompok masyarakat, dan individu semua memiliki kesempatan dalam dunia yang semakin terkoneksi. Penelitian ini, akan menganalisis mengenai bagaimana globalisasi berdampak terhadap ekonomi Vietnam, khususnya yang berkaitan dengan kerangka pembangunan *Belt and Road Initiative*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kronologi masalah dari suatu peristiwa yang terjadi. Nazir mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa masa kini. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan fakta yang terjadi, secara detail serta sistematis, dan variabel yang diteliti tidak ditambahi maupun dikurangi (Nazir, 2014). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam teknik ini, sumber data yang peneliti gunakan adalah data yang berbasis dokumen (*Document Basic Research*) yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, *website* resmi pemerintah, dan berita (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Dinamika Politik-Ekonomi Vietnam

Vietnam merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Pada pertengahan abad 19, Vietnam merupakan negara yang mengadopsi sistem ekonomi berbasis agraris yang berpusat di pedesaan. Perancis yang pada saat itu menguasai Vietnam membagi pusat perekonomian, di mana wilayah selatan menganut sistem produksi pertanian, sedangkan utara fokus pada produksi manufaktur. Kebijakan ini membuat wilayah selatan dapat berkembang dengan mengandalkan ekspor beras, sedangkan wilayah selatan menggiatkan ekspor batu bara (Riedel & Turley, 1999).

Ketika perang saudara meletus pada tahun 1955, kedua wilayah juga mengadopsi ideologi yang berbeda. Bagian selatan mengadopsi komunisme yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara itu, bagian utara dikuasai oleh kelompok kapitalis yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara sekutunya. Perang yang berakhir pada tahun 1975 ini mengakibatkan kerugian parah bagi Vietnam dalam segala sektor, termasuk ekonomi. *Vietnam Communist Party* (VCP) yang memerintah pasca reunifikasi berupaya membangun ekonomi dengan prinsip komunisme, melaksanakan reformasi, dan menetapkan target pertumbuhan ekonomi (Riedel & Turley, 1999). Namun, kebijakan VCP yang kurang inklusif membuat pertumbuhan ekonomi pada saat itu stagnan. Pada periode tahun 1980-an, Vietnam digolongkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sistem ekonomi yang dianut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan, Vietnam mengalami inflasi hingga mencapai angka 400 persen, dan terjadi pemadaman listrik di beberapa kota-kota Vietnam (Fund., 2018).

Vietnam pasca perang dipandang oleh Beijing sebagai negara yang berperilaku buruk, terkait dengan sengketa batas wilayah dan kedekatan Vietnam dengan Uni Soviet. Kondisi ini dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip hubungan persaudaraan kedua negara. Namun di sisi lain, Vietnam terus berupaya memperbaiki hubungan dengan Tiongkok yang dianggap penting bagi rekonstruksi ekonomi pasca perang. Terdapat beberapa faktor yang membuat Vietnam beranggapan demikian. *Pertama*, Tiongkok telah menjadi sumber donor utama bagi Vietnam selama tahun 1955-

1975. *Kedua*, potensi besar yang dimiliki Tiongkok dinilai dapat menguntungkan bagi ekspor Vietnam. Dan *ketiga*, yaitu letak geografis kedua negara yang berdekatan dapat menjadi keuntungan dalam aktivitas perdagangan (Path, 2012).

Meskipun terbuka pada kerja sama bilateral, namun kebijakan luar negeri Vietnam pada masa itu masih berfokus pada transformasi sosialis. Oleh karenanya, Vietnam berupaya membangun hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, Tiongkok, dan beberapa negara sosialis di Eropa Timur dan Eropa Barat. Akan tetapi hubungan Vietnam dengan beberapa negara tersebut tidak bisa dikatakan baik-baik saja, terutama terhadap Tiongkok. Sengketa perbatasan antara kedua negara sempat memasuki masa kritis dan bahkan menyebabkan konflik bersenjata. Berdasarkan sebuah laporan, pada masa kritis hubungan kedua negara, diketahui bahwa telah terjadi beberapa kasus bentrokan antara Vietnam-Tiongkok. Pada tahun 1974, terdapat 100 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 400 kasus pada 1975, dan 900 kasus pada tahun 1976. Selain itu, kedua negara juga terlibat dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan karena memperebutkan kepemilikan atas Pulau *Paracel* dan Pulau *Spratly* (Path, 2012). Dilatar belakangi oleh masalah-masalah tersebut, pada tahun 1975 hingga 1978, Tiongkok menjatuhkan sanksi ekonomi yang membuat perekonomian Vietnam menjadi rentan.

Dalam upaya mengeluarkan Vietnam dari keterpurukan ekonomi, pemerintah memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai '*đổi mới hay là ché*' atau '*renovate or die*'. Transformasi ini tak lepas dari kematian ketua parta komunis, Le Duan, yang menginginkan agar Vietnam menerapkan elemen-elemen utama dari bentuk *old economy*. Selain itu, pada masa tersebut Uni Soviet juga melakukan transformasi luar biasa di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, yang memperkenalkan program *perestroika* (restrukturisasi) dan *glasnost* (keterbukaan dan transparansi) (Vuving, 2021). Sebagai sekutu dekat Uni Soviet, perubahan tersebut memberi tekanan pada Vietnam untuk menerapkan kebijakan serupa. Ide dan model kebijakan yang lebih terbuka memberi peluang bagi terbentuknya pasar bebas, dan membuka peluang bagi kerja sama yang lebih luas dengan pihak eksternal.

Pada periode akhir 1980-an, konsep *worldview* yang dianut oleh Vietnam mengalami kemajuan pesat. Pemerintah mulai merestrukturisasi kebijakan luar negeri '*đổi mới tư duy i ngoai*', dengan melihat dunia sebagai pasar tunggal yang diisi oleh negara besar dan negara kecil yang saling terikat dalam hubungan interdependensi. Meskipun pada dasarnya negara besar memiliki pengaruh paling kuat, namun setidaknya negara kecil dapat mencari jalan kemakmuran dengan melaksanakan kerja sama internasional, memanfaatkan kemajuan teknologi, terlibat dalam pembangunan global, dan memanfaatkan potensi globalisasi. Oleh karena itu, para pemikir baru dalam kebijakan mendorong agar Vietnam dapat hidup berdampingan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Memprioritaskan pembangunan ekonomi, keamanan nasional strategis, integrasi ke dalam pasar global, pengembangan industri, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas idealisme ideologi (Vuving, 2021). Dalam beberapa periode selanjutnya, konsep dan ide ini menjadi landasan hubungan luar negeri Vietnam, yang juga menjadi dasar normalisasi hubungannya dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan ASEAN.

Transisi struktur ekonomi dan pedoman luar negeri Vietnam memberi keuntungan bagi proses pembangunan dan kemajuan. Sistem yang sebelumnya cenderung tertutup kini mulai terbuka dan menganut nilai inklusif. Keterbukaan ekonomi menumbuhkan peluang di berbagai sektor domestik yang berkontribusi pada pembangunan Vietnam. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi bisa dikatakan memainkan peranan penting dalam sektor ekonomi Vietnam, sehingga bisa menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara.

Gambaran Proyek Pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI)

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan proyek berskala global yang dikembangkan oleh Tiongkok. BRI terdiri dari dua koridor pembangunan, yaitu *Silk Road Economic Belt* yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, melalui kawasan Asia Tengah serta *21st Century Maritime Silk*

Road yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, melalui jalur laut yang melintasi perairan Asia Tenggara, Samudera Hindia, dan perairan Afrika. Proyek ini pertama kali diumumkan pada tahun 2013 oleh Xi Jinping dengan nama *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian berubah menjadi BRI. Xi Jinping dalam konferensi *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) 2013, menegaskan bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi tujuan pembangunan BRI, yaitu memperkuat koneksi kebijakan dan kerja sama ekonomi; memperkuat koneksi koridor dan prasarana; menciptakan jalur transportasi yang menghubungkan Pasifik, Laut Baltik, Asia Tengah dan Laut Hindia; serta membangun koridor transportasi yang menghubungkan Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Selain itu, juga menguatkan kerja sama perdagangan dengan menghapuskan *trade barriers* dan mengurangi ongkos perdagangan dan halangan investasi; menguatkan kerja sama keuangan, agar mengurangi ongkos transaksi dan risiko keuangan; dan menciptakan perekonomian yang kompetitif; serta menguatkan hubungan antara masyarakat (Kartini, 2015).

Dalam acara forum BRI yang diadakan pada tahun 2017, Xi Jinping menyampaikan bahwa “*In pursuing the Belt and Road Initiative, we should focus on the fundamental issue of development, release the growth potential of various countries and achieve economic integration and interconnected development and deliver benefits to all*” (China Power, 2017). Maka dapat dipahami bahwa BRI merupakan proyek yang mengutamakan integrasi dan keuntungan bersama bagi kawasan yang terlibat. Proyek ini diproyeksikan agar dapat memperluas dan memperkuat keterhubungan antar kawasan, yang bertujuan memudahkan aliran barang, jasa, dan ide.

Pergantian nama dari OBOR ke BRI selain dilatarbelakangi oleh maksud agar nama tersebut menjadi lebih inklusif, juga untuk menggambarkan bahwa proyek ini tidak hanya terdiri dari *one belt* (satu sabuk) dan *one road* (satu jalur) saja, melainkan oleh beberapa koridor yang membentuk koneksi antara kawasan-kawasan yang dilintasi. Beberapa koridor tersebut di antaranya; *pertama, New Eurasian Land Bridge* yang merupakan jalur kereta internasional yang menghubungkan Provinsi Jiangsu di Tiongkok dan Rotterdam di Belanda. *Kedua, China-Mongolia-Russia Economic Corridor*, yang menghubungkan Tiongkok, Mongolia, dan Rusia. Dalam koridor ini terdapat dua jalur berbeda, yaitu jalur yang menghubungkan Dailan, Shenyang, Changchun, dan Harbin, serta jalur yang menghubungkan Manzhouli dan Kota Chita. *Ketiga, China-Central Asia-West Asia Economic Corridor* yang menghubungkan Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turki, Iran, Turkmenistan, dan beberapa negara Asia Barat. *Keempat, China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CIPEC)* yang menghubungkan Tiongkok Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. *Kelima, Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIM)* yang merupakan jalur yang menghubungkan Kolkata dan Kunming, melalui teritorial Bangladesh dan Myanmar. *Keenam, China-Pakistan Economic Corridor* yang menghubungkan Kashgar di Tiongkok dengan Pelabuhan Gwadar di Pakistan.

Pada dasarnya pembangunan BRI diharapkan dapat membantu negara-negara terlibat untuk keluar dari kemiskinan, dan dapat membuka diri terhadap peluang yang lebih besar. Adapun beberapa strategi yang menjadi prioritas utama BRI antara lain (Wong, 2017), (1) Mendukung kebijakan “*go global*” Tiongkok yang diharapkan mampu mempercepat proses internasionalisasi perusahaan-perusahaan nasional dan rantai perdagangan global maupun internasional; (2) Meningkatkan jumlah ekspor ke negara BRI secara eksponensial. Tingkat ekspor Tiongkok terhadap negara-negara BRI berada pada jumlah yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ekspor Tiongkok ke negara Eropa dan Amerika Serikat. Dengan adanya pembangunan proyek BRI diproyeksikan agar dapat meningkatkan jumlah investasi ke negara-negara tersebut; (3) Mempromosikan restrukturisasi industri. Pembangunan proyek BRI diharapkan mampu membuat perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bersaing di pasar global. Selain itu, perusahaan ini diharapkan mampu mencari sistem yang terbaik dari peluang-peluang internasional, membuka kesempatan kerja bagi pekerja dari negara lain, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

Selain itu, (4) Meningkatkan kekuatan geopolitik Tiongkok sebagai kekuatan regional maupun global. Pembangunan BRI diharapkan mampu memperkuat Tiongkok baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Pengaruh tersebut juga tidak terbatas pada regional, namun hingga global; (5) Menguatkan mata uang *Renminbi* (RMB) dalam cakupan global. Hingga saat ini telah banyak bukti yang menyiratkan bahwa pembangunan proyek BRI telah berhasil memperkuat pengaruh mata uang Tiongkok (*renminbi*); (6) Mengatasi masalah kelebihan dalam hal pasokan industri. Selama ini Tiongkok mengalami kelebihan suplai dalam beberapa industrinya. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan BRI diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk menemukan pasar baru kelebihan suplai tersebut.

Sejauh ini proyek pembangunan BRI mendapat respons positif dari negara-negara terlibat, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan BRI telah memberi dampak positif bagi Asia Tenggara. *Pertama*, adalah dari sektor perdagangan. Pembangunan BRI telah meningkatkan interkoneksi antara Tiongkok-Asia Tenggara dengan Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Myanmar sebagai negara-negara yang paling diuntungkan. Tiongkok juga terus meningkatkan hubungan ekonominya dengan kawasan ini melalui berbagai kerja sama, seperti misalnya pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA), yang kemudian pada tahun 2014 diintegrasikan menjadi bagian dari proyek BRI.

Kemudian yang *kedua* adalah dari sektor modal yang mencakup *foreign direct investment* (FDI), *portfolio investment*, dan *official investment*. Dalam beberapa tahun Tiongkok telah menunjukkan fokusnya terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peran Tiongkok sebagai *outbound* investor menjadi semakin terlihat. Selain didorong oleh pertumbuhan pesat domestik Tiongkok, peningkatan ini juga disebabkan oleh adanya pembangunan BRI. Di antara berbagai macam sektor, transportasi dan logistik menjadi dua sektor yang memiliki konsentrasi paling tinggi dalam proyek BRI dengan total nilai mencapai USD 330 miliar, yang tersebar di 88 negara. Kemudian disusul oleh sektor energi dan utilitas dengan total nilai USD 226 miliar pada tahun 2013. Kemudian beberapa negara Asia Tenggara yang menerima investasi terbesar antara lain: Indonesia (USD 171 miliar), Vietnam (USD 152 miliar), Kamboja (USD 104 miliar), Malaysia (USD 98 miliar) dan Singapura (USD 70 miliar). Indikator yang *ketiga* adalah sektor *people*, di mana pembangunan BRI telah mendorong peningkatan interaksi antara masyarakat, yang terjadi melalui peredaran tenaga kerja dalam kerangka pembangunan BRI (Cox, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa selama pembangunan BRI berlangsung telah terjadi peningkatan koneksi antara negara-negara terlibat. Keterbukaan ekonomi memberi keuntungan yang didapatkan baik melalui investasi maupun pembangunan infrastruktur. Sebagai kawasan yang berdekatan dengan Tiongkok, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang menerima dampak positif dari adanya proyek ini. Negara-negara terlibat mendapat keuntungan baik dalam sektor *trade*, *capital*, maupun *people-to-people*. Lalu, bagaimana dengan Vietnam yang sebelumnya dikenal sebagai negara tertutup? Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Vietnam memanfaatkan keterbukaan yang ditawarkan globalisasi, melalui kerangka pembangunan BRI.

***Belt and Road Initiative* (BRI), Globalisasi, Vietnam**

Tiongkok sebagai salah satu kekuatan global telah memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai kawasan. Dominasi Tiongkok dalam perekonomian global terlihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa sekitar 20 persen dari total keseluruhan perdagangan manufaktur adalah berasal dari Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memiliki banyak perusahaan besar yang diproyeksikan dapat membantu upaya pembangunan BRI. Adapun perusahaan global Tiongkok dominan berfokus pada bidang konstruksi. Berdasarkan data dari Engineering News Record, tujuh dari 10 kontraktor terbesar global merupakan kontraktor yang berasal dari Tiongkok (Books, 2020).

Dapat dipahami bahwa globalisasi merupakan proses jangka panjang yang telah membentuk distribusi kekuatan global. Negara-negara dunia pertama yang didominasi oleh negara barat dianggap sebagai akselerator globalisasi. Namun, globalisasi ala barat telah mengalami penurunan sejak terjadinya krisis keuangan global. Krisis globalisasi ala barat juga ditandai oleh fenomena di dua negara kapitalis terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dengan ‘American First’-nya dan Britania Raya dengan kebijakan ‘Brexit’-nya. Apabila melihat lebih jauh, dua kebijakan ini memuat nilai-nilai anti globalisasi karena bersifat inward looking. Di sisi lain, Tiongkok semakin menegaskan komitmennya terhadap globalisasi. Pada tahun 2017, Xi Jinping dengan percaya diri menyampaikan kepercayaan terhadap keterbukaan perdagangan ekonomi. Mungkin akan menjadi aneh jika mendengar kalimat semacam itu dari pemimpin-pemimpin Tiongkok sebelumnya. Namun, kesadaran Tiongkok terhadap peluang keterbukaan merupakan mesin penggerak pertumbuhan mereka saat ini.

Vietnam memiliki sejarah kedekatan dengan Tiongkok. Bahkan, kedua negara sama-sama menganut ideologi sosialis, dan sistem pemerintahan yang hampir sama. Namun kedua negara mampu mereformasi perekonomian dan berintegrasi ke dalam pasar global. Pasca reformasi ekonomi Vietnam ditandai oleh pertumbuhan ekspor Vietnam yang meningkat dari 26.4 persen pada tahun 1990, menjadi 77.9 persen pada tahun 2008. Sementara itu, dalam sektor impor Vietnam mengalami pertumbuhan pesat dari 35.7 persen pada tahun 1990, menjadi 93.1 persen pada tahun 2008. Pertumbuhan ini tak lepas dari kebijakan baru Vietnam yang lebih terbuka terhadap kerja sama luar negeri, bahkan dengan negara non sosialis. Persetujuan kerjasama Vietnam dan WTO yang disepakati pada tahun 2007, telah mempercepat ekspansi dalam bidang investasi dan perdagangan. Konsekuensinya, Vietnam mengalami puncak pertumbuhan ekonomi sebesar 8.5 persen. Selain itu, perjanjian yang disepakati bersama dengan Uni Eropa pada tahun 1992 juga turut membantu ekspansi ekonomi Vietnam ke dalam perekonomian global. Bahkan, Vietnam melakukan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, serta membentuk kerja sama ekonomi pada periode 2000-an (Abbott & Tarp, 2012).

Akan tetapi, integrasi Vietnam ke dalam perekonomian global juga berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap krisis. Salah satu krisis terparah adalah yang terjadi pada tahun 2008, yang berdampak pada turbulensi perdagangan global khususnya perdagangan jangka pendek. Berdasarkan data IMF, krisis tersebut menyebabkan penurunan ekspor sebesar 60 persen. Sementara itu, WTO melaporkan bahwa terjadi penurunan volume ekspor sebesar 12 persen secara mengglobal. Bagi Vietnam sendiri, krisis tersebut telah menyebabkan penurunan sebesar 7.7 persen pada tahun 2009 (Abbott & Tarp, 2012). Namun demikian, krisis yang terjadi tidak berarti membuat Vietnam merasakan kerugian dari keputusan mereka untuk merangkul globalisasi. Justru jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian domestik mereka pada masa ekonomi tertutup, Vietnam telah merasakan banyak dampak positif dari adanya globalisasi.

Globalisasi Ekonomi Vietnam dan Pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI)

Kawasan Asia Tenggara didominasi oleh negara-negara berkembang yang sebagian besar di antaranya memiliki kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur. Bagi Vietnam, hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Dalam beberapa tahun ke depan, kebutuhan Vietnam terhadap pembangunan infrastruktur diprediksi akan tetap meningkat. Berdasarkan data *Global Infrastructure Outlook*, pada tahun 2016 hingga 2040 jumlah pendanaan yang dibutuhkan Vietnam bagi pembangunan infrastruktur berkisar pada USD 605 miliar. Adapun sektor yang menjadi perhatian utama adalah kelistrikan dan jalan raya yang membutuhkan dana sekitar masing-masing 43.8 persen dan 22.1 persen dari total keseluruhan dana yang dibutuhkan. Namun, pemerintah Vietnam mengalami kendala dalam upaya mendapatkan pendanaan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 mereka masuk dalam status negara *middle income*, yang berdampak pada kesulitan dalam mempromosikan *Public Private Partnership* yang disebabkan oleh pengetatan regulasi keuangan dan

hukum. Akibatnya, aliran dana *Official Development Assistance* (ODA) terhadap Vietnam mengalami penurunan yang cukup signifikan (Hiep, 2018).

Adanya inisiatif pembangunan BRI menjadi harapan bagi kebutuhan Vietnam terhadap pendanaan infrastruktur. Pada tahun 2017, Presiden Vietnam Tran Dai Quang memberikan sambutan hangat terhadap proyek pembangunan BRI dan upaya mempromosikan konektivitas ekonomi dan kawasan. Quang juga menyampaikan harapannya agar kerja sama yang terbentuk harus menjamin efektivitas, inklusifitas, sustainabilitas, keterbukaan, transparansi, saling menghormati, kesetaraan, kesukarelaan, dan manfaat yang sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Apa yang disampaikan oleh Quang merupakan gambaran bahwa sebenarnya Vietnam masih memiliki keraguan dan kecurigaan terhadap Tiongkok berkaitan dengan masuknya proyek BRI di negaranya.

Sejauh ini Vietnam tetap memperlihatkan komitmen dalam upaya pembangunan koridor BRI. Pada kunjungan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ke Vietnam pada tahun 2017, kedua negara menandatangani nota kesepahaman yang berisi komitmen untuk mempromosikan kerangka kerja sama *‘Two Corridors, One Belt’* dalam kerangka BRI. Dua koridor ekonomi yang dimaksud tersebut adalah koridor *Kunming-Lao Cai-Ha Noi-Hai Phong-Quang Ninh* dan koridor *Nanning-Lang Son-Ha Noi-Hai Phong-Quang Ninh*. Kedua koridor tersebut dibangun untuk menghubungkan antara Yunan dan Guangxi dengan 12 kota dan provinsi Vietnam. Sedangkan *Tonkin Gulf Economic Belt* bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak, khususnya aktivitas perekonomian di sekitar *Tonkin Gulf*. Sejauh ini terdapat 18 proyek BRI yang sedang direncanakan yang tersebar di 7 wilayah. Adapun kerja sama ini termasuk penggunaan mata uang Renminbi di perbatasan, keterhubungan jalur kereta api, bank, zona ekonomi, dan pembangkit listrik. Secara spesifik berikut merupakan daftar proyek pembangunan BRI di Vietnam (Thi Vu & Hao Dong, 2019),

Tabel 1. Daftar Proyek BRI di Vietnam

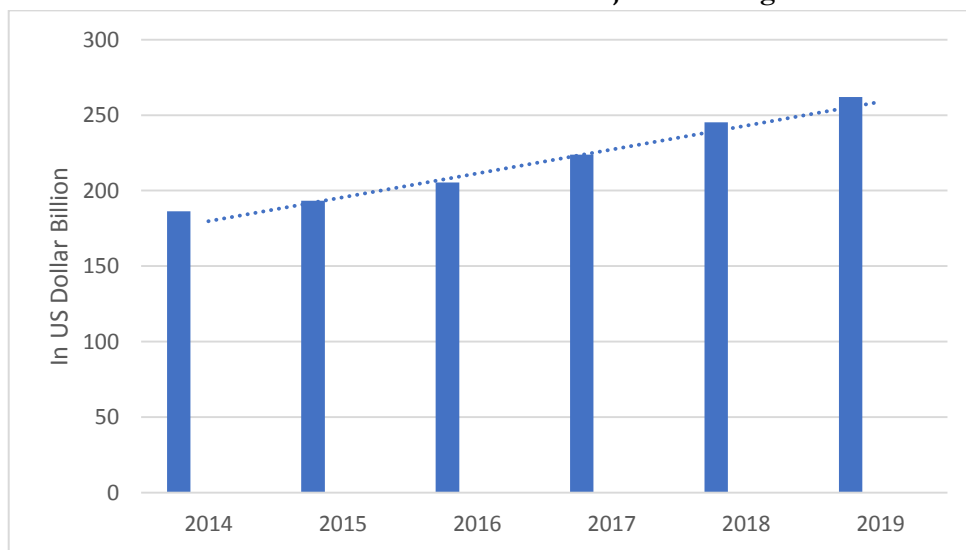
Wilayah	Proyek BRI
Lao Cai	1. Penggunaan Renminbi di perbatasan 2. Kerja sama zona ekonomi perbatasan Lao Chai-Honghe
Cao Bang	1. Penggunaan Renminbi di perbatasan 2. Kerja sama zona ekonomi perbatasan Tra Linh-Longbang
Lang Son	1. Penggunaan Renminbi di perbatasan 2. Kerja sama zona ekonomi perbatasan Dongdang- Pingxiang
Quang Ninh	1. Penggunaan Renminbi di perbatasan 2. Kerja sama zona ekonomi perbatasan Mong Chai- Dongxing
Hai Pong	1. Jalur kereta api yang menghubungkan Hai Phong (Vietnam) ke Honghe (Yunan)
Binh Thuan	2. Pembangunan 1 pembangkit energi termal Vinh Tan
Hai Noi	1. Proyek pembangunan jalur kereta api skytrain yang menghubungkan Cat Linh- Ha Dong 2. Proyek pembangunan jalur kereta api Lao Cai-Hanoi 3. Jalur kereta api yang menghubungkan Guangxi (Tiongkok) dengan Yen Vien (Hanoi) 4. Rute kereta api Hanoi-Jiangxi dai 22 November ke 2017 5. Beberapa kerja sama proyek kapasitas produksi 6. Pendirian cabang <i>China Agriculture Bank</i> di Hanoi

Wilayah	Proyek BRI
	7. Kerja sama <i>The State Bank of Vietnam (SBV)</i> dengan <i>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</i>
	8. Kerja sama <i>The Cuu Lung Infrastructure Investment and Development Cooperation (CIPM)</i> di bawah pengawasan <i>Ministry of Transportation</i> yang telah mendapat persetujuan sebagai bagian dari pendanaan AIIB

Sumber: *Olahan Peneliti, 2022*

Lebih lanjut, meskipun Vietnam sering memperlihatkan keresahan dan kecurigaannya terhadap pembangunan BRI, namun secara keseluruhan mereka telah menerima banyak bantuan pendanaan dari Tiongkok. Diketahui bahwa pihak Vietnam telah menerima lebih dari USD 16 miliar khusus dalam sektor pembangunan proyek yang dibiayai oleh Tiongkok (Abuza & Vu, 2021). Kontradiksi antara sikap curiga Vietnam dengan kebutuhan mereka juga tergambar pada kunjungan presiden AIIB, Qin Luqin, ke Vietnam pada bulan Maret 2017. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Vietnam meminta kepada AIIB agar berinvestasi terhadap pembangunan infrastruktur Vietnam, khususnya terhadap proyek yang di sponsori oleh swasta (Hiep, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memberi perhatian terhadap resiko dari adanya pembangunan BRI, namun mereka tidak bisa membantah bahwa proyek ini memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik Vietnam.

Gambar 1. Pertumbuhan GDP Vietnam Sejak Pembangunan BRI



Sumber: *tradingeconomics.com*

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa sejak tahun 2014, Vietnam mengalami pertumbuhan GDP yang cukup signifikan. Setiap tahunnya, Vietnam mengalami rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 6-7 persen. Pertumbuhan ini sebagian besar bergantung pada pemasukan dari modal dan tenaga kerja yang murah. Untuk menjaga rasio pertumbuhan ini, Vietnam perlu untuk meningkatkan model dan struktur industrinya. Meskipun sejak tahun 1990 Vietnam telah mengadopsi konsep ‘industrialisasi dan modernisasi’ dengan menargetkan Vietnam sebagai negara industri pada tahun 2020, namun rasio industrialisasi mereka masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara besar ASEAN lainnya (Fukuoka, 2021). Aliran dana, koneksi ide, dan *sharing* teknologi melalui pembangunan proyek BRI menjadi peluang bagi Vietnam untuk memanfaatkannya sebagai katalisator dalam mempercepat proses industrialisasi. Oleh karenanya, juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, Vietnam berpotensi besar menjadi pintu masuk barang-barang produksi Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Aliran dana investasi yang masuk melalui BRI juga memberi peluang bagi Vietnam untuk mengoptimalkan industri pengelolaan sumber daya alamnya. Dalam hal ini, Vietnam harus berkaca pada Tiongkok dan Laos yang mampu mengembangkan industri pertambangannya secara baik. Saat ini, Vietnam hanya memiliki satu tambang tembaga dan beberapa tambang emas berskala kecil. Padahal negara ini dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil-hasil pertambangan. Selain itu, aliran FDI yang masuk melalui BRI diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan mendorong pembangunan infrastruktur serta kemajuan ekonomi domestik.

Selain daripada potensi ekonomi yang didapatkan, pembangunan proyek BRI di Vietnam dapat menjadi cara baru untuk membangun hubungan strategis Vietnam dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diikuti oleh penguatan militer tentu menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya, termasuk Vietnam. Oleh sebab itu, perlu membentuk kepercayaan antara kedua negara untuk menghindari terjadinya konflik antara satu sama lain. Selain itu, dengan terbentuknya kerja sama strategis antara kedua negara, Vietnam dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, baik dari proses *sharing* teknologi, ide, maupun aliran investasi.

KESIMPULAN

Pada periode tahun 1980-an, Vietnam dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sistem ekonomi yang diterapkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Inflasi yang terjadi bahkan mencapai angka 400 persen. Namun pemerintah mulai menganut sistem perekonomian yang terbuka dan inklusif yang tergambar dalam kebijakan *doi moi*. Keterbukaan ekonomi menumbuhkan peluang dalam berbagai sektor domestik yang berkontribusi pada pembangunan. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi bisa dikatakan memainkan peranan penting dalam sektor ekonomi Vietnam, sehingga bisa menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara. Keterbukaan ekonomi juga terimplementasikan dalam keterlibatan Vietnam dalam kerja sama proyek global BRI.

Sejauh ini terdapat 18 proyek BRI yang sedang direncanakan yang tersebar di 7 wilayah Vietnam. Kerja sama ini termasuk penggunaan mata uang Renminbi di perbatasan, interkoneksi jalur kereta api, bank, zona ekonomi, dan pembangkit listrik. Adanya pembangunan BRI memberi keuntungan bagi pemerintah Vietnam yaitu untuk mengoptimalkan industri pengelolaan sumber daya alamnya. Dalam hal ini, Vietnam harus berkaca pada Tiongkok dan Laos yang mampu mengembangkan industri pertambangannya secara baik. Saat ini, Vietnam hanya memiliki satu tambang tembaga dan beberapa tambang emas berskala kecil. Padahal negara ini dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil-hasil pertambangan.

Selain itu, aliran FDI yang masuk melalui BRI diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan mendorong pembangunan infrastruktur serta kemajuan ekonomi domestik. Lebih jauh, kerja sama dalam BRI, membuat Vietnam dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, baik dari adanya *sharing* teknologi, ide, maupun aliran investasi dari Beijing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas J Ali and Erdener Kaynak. (2021). The Theory and Practice of Globalization. *Globalization of Business*, 13–32. <https://doi.org/10.4324/9780203824887-5>

- Abbott, P., & Tarp, F. (2012). Globalization Crises, Trade and Development in Vietnam. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.1142/S1793993312400066>
- Abuza, Z., & Vu, P. (2021). *Vietnam's Hidden Debts to China Expose its Political Risks*. THE DIPLOMAT. <https://thediplomat.com/2021/10/vietnams-hidden-debts-to-china-expose-its-political-risks/>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Beerkens, E. (2006). Globalisation: Definitions and perspectives. *Erişildi: Ocak*, 20.
- Brandon Levy. (2013). The Role of Globalization in Economic Development?. *SSRN Electronic Journal*, 137–143. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2233648>
- Cai, P. (2017). *UNDERSTANDING CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE*. LOWY INSTITUTE. <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative>
- Fukuoka, Y. (2021). *Vietnam's quest to become „a developed country by 2045“: challenges of sustaining growth and expectations for foreign capital*. *April*, 1–9.
- Hiep, L. H. (2018). The Belt and Road Initiative in Vietnam: Challenges and Prospects. *ISEAS Perspective*, 2018(18), 1–7.
- Kosal Path. (2012). China's Economic Sanctions against Vietnam, 1975–1978. *Cambridge University Press*, 212, 1040–1058. <https://doi.org/10.1017/S0305741012001245>
- Michael Cox. (2018). China's Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. *LSE Ideas; CIMB ASEAN Research Institute*, October, 1–52. <http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>
- Minh Thi Vu and Thi Minh Hao Dong. (2019). A Vision for Vietnam in the Revolution 4.0. *European Journal of Engineering*. <https://doi.org/10.24018/ejers.2019.4.9.1526>
- Moh. Nazir Ph.D. (2014). *Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muthoka, S., Muthuri, E., & Oginga, J. (2015). *Munich Personal RePEc Archive Globalisation in Africa: An Overview Globalization in Africa: An Overview 1*. 65474, 1–10. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1035.8884>
- Nikoloz Parjanadze. (2009). Globalisation Theories and Their Effect on Education. *International Black Sea University Scientific Journal*, 77–88. <http://search.proquest.com/docview/865523946?accountid=14771>
- Pemula, P. D. (2017). *How Will the Belt and Road Initiative Advance China Interest*. Cina Power. <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>
- Penelitian, P., Lembaga, P., & Pengetahuan, I. (2015). *Kebijakan Jalur Sutra Baru China dan Implikasinya bagi USA*. 131–147.
- Regional Studies Policy Impact Books. (2020). *The BRI and Globalisation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2578711X.2020.1823711>
- Riedel, J., & Turley, W. S. (1999). The Politics and Economics of Transition To an Open Market Economy in Viet Nam. *OECD Development Centre Working Papers*, 152(152).
- Sri, M., & Suliswanto, W. (2011). Globalization and Gross Domestic Product Construction in Asean. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(2), 155–167.
- Suliswanto, M. S. W. (2016). Tingkat Keterbukaan Ekonomi. *NeO~Bis*, 10(1), 33–48.
- Trading Economics. *Vietnam GDP*. <https://tradingeconomics.com/vietnam/gdp>
- Tung, N. (2021). *Vietnam forecast to be fastest-growing economy in SEA in 2021: ADB*. HANOI TIMES. <https://hanoitimes.vn/vietnam-forecast-to-be-fastest-growing-economy-in-sea-in-2021-adb>
- Vietnam: Raising Millions Out of Poverty*. (2018). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Countries/VNM/vietnam-raising-millions-out-of-poverty>
- Vuving, A. L. (2021). *The Evolution of Vietnamese Foreign Policy in the Doi Moi Era*. February 2021, 1–36.

- Wong, A., Jia, S., Chubarov, I., Lu, H., Rohr, C., Hafner, M., Knack, A., Beeson, Mark Xue, L., Tracy, E. F., & Shvarts, E. (2017). Belt & Road: Opportunity & Risk The prospects and perils of building China's New Silk Road. *Journal of Cleaner Production*, 6(3), 28. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007><https://doi.org/10.1080/20954816.2018.1499072><http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2017.1291503><https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1291503><https://doi.org/10.1080/20954816.2018.1498992><https://doi.org/10.1080/20954816.2018.1498992>
- Zoran Stefanović. (2008). GLOBALIZATION: THEORETICAL PERSPECTIVES, IMPACTS AND INSTITUTIONAL RESPONSE OF THE ECONOMY. *Economics and Organization*. <http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200803/eao200803-09.pdf>